



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Keberadaan PT Bio Farma (Persero) yang bertindak sebagai Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi tentu dibarengi dengan tanggung jawab besar untuk mewujudkan aspirasi Pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekosistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. Untuk itu, izinkan saya mewakili jajaran Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan Bio Farma untuk tahun buku 2023, terutama dari sudut pandang Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Dear Shareholders and Stakeholders,

The existence of PT Bio Farma (Persero) acting as the State-owned Pharmaceutical Holding is certainly accompanied by a great responsibility to realize the aspirations of the Government of Indonesia in strengthening a strong and sustainable health ecosystem. Therefore, allow me on behalf of the Board of Commissioners to present Bio Farma's Annual Report for the fiscal year 2023, especially from the perspective of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function.



Bersama-sama Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Tangguh

Together Realizing a Resilient Indonesian Economy

Perekonomian Indonesia di tahun 2023 memperlihatkan kemampuannya untuk tetap mencatat pertumbuhan yang baik di tengah tantangan perekonomian dunia. International Monetary Fund (IMF) dalam dokumen World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2023 memproyeksikan perekonomian global tahun 2023 tumbuh sebesar 3%, melambat dari tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 3,5%. Negara-negara maju diperkirakan akan melambat dari 2,6% pada tahun 2022 menjadi 1,5% pada tahun 2023 yang disebabkan dampak dari pengetatan kebijakan moneter. Sementara negara-negara berkembang diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan pertumbuhan, dari 4,1% pada tahun 2022 menjadi 4% pada tahun 2023. Masih mengutip dari data WEO oleh IMF, meskipun inflasi dunia akan mengalami penurunan, inflasi masih menjadi tantangan serius yang berdampak besar terhadap perekonomian dunia. Inflasi global diperkirakan akan terus menurun, dari 8,7% pada tahun 2022 menjadi 6,9% pada tahun 2023. Di samping masalah ketimpangan pasokan komoditas global pasca pandemi COVID-19 yang memberikan dampak cukup signifikan bagi inflasi, faktor krisis geopolitik menjadi hal yang turut memperburuk berbagai persoalan dunia.

Indonesia's economy in 2023 shows its ability to continue to record good growth amid the challenges of the world economy. The International Monetary Fund (IMF) in the October 2023 edition of the World Economic Outlook (WEO) document projects the global economy in 2023 to grow by 3%, slowing down from 2022 with growth of 3.5%. Developed countries are expected to slow down from 2.6% in 2022 to 1.5% in 2023 due to the impact of tightening monetary policy. Meanwhile, developing countries are expected to experience a slight decline in growth, from 4.1% in 2022 to 4% in 2023. Still quoting from the WEO data by the IMF, although world inflation will decline, inflation is still a serious challenge that has a major impact on the world economy. Global inflation is expected to continue to decline, from 8.7% in 2022 to 6.9% in 2023. In addition to the problem of imbalances in global commodity supply after the COVID-19 pandemic which has a significant impact on inflation, the geopolitical crisis factor is something that has contributed to exacerbating various world problems.

Di tengah tantangan perlambatan perekonomian global tersebut, perekonomian Indonesia justru mampu membukukan kinerja yang cukup tangguh. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%. Meskipun melambat dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 5,31%, capaian ini menjadi hal positif di mana perekonomian Indonesia mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi dunia.

Pada sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,96%; diikuti Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 7,59%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi dominan dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) di sisi produksi tumbuh sebesar 4,64%. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya tumbuh sebesar 1,30%.

Dari sisi konsumsi atau pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 9,83%; diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,82%; Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,40%; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,95%; dan Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,32%. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran berkontraksi sebesar 1,65%.

TangguhnyaperekonomianIndonesiataklepasdariinflasi nasional yang menunjukkan tren normalisasi dengan perlambatan inflasi terjadi lebih cepat dari perkiraan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2023 ditutup di level 2,61% dengan inflasi inti yang rendah pada level 1,80%, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi IHK tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,51%. Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter diharapkan mampu terus dilanjutkan agar perekonomian Indonesia mampu untuk tetap stabil di masa mendatang.

In the midst of the challenges of the global economic slowdown, the Indonesian economy was actually able to record a fairly resilient performance. Quoting data from of BPS - Statistics Indonesia, the Indonesian economy recorded a growth of 5.05%. Although slowing down from the previous year with a growth of 5.31%, this achievement is a positive thing where the Indonesian economy is able to grow above world economic growth.

On the production side, the Transportation and Warehousing business field recorded the highest growth of 13.96%; followed by Information and Communication which grew by 7.59%. Meanwhile, the Manufacturing Industry, which has a dominant contribution to the structure of Gross Domestic Product (GDP) on the production side, grew by 4.64%. Meanwhile, Agriculture, Forestry and Fisheries only grew by 1.30%.

In terms of consumption or expenditure, growth occurred in all components of expenditure. The highest growth occurred in the consumption expenditure component of non-profit institutions serving households by 9.83%; followed by household consumption by 4.82%; gross fixed capital formation (PMTB) by 4.40%; government consumption expenditure by 2.95%; and exports of goods and services by 1.32%. Meanwhile, the Import of Goods and Services component as a deduction factor in GDP by expenditure contracted by 1.65%.

The resilience of Indonesia's economy is inseparable from national inflation which shows a normalizing trend with inflation slowing down faster than expected. Consumer Price Index (CPI) inflation in December 2023 closed at 2.61% with low core inflation at 1.80%, lower than the CPI inflation in 2022 which was recorded at 5.51%. The success of the Gol in formulating monetary policy is expected to continue so that the Indonesian economy is able to remain stable in the future.



Pada industri farmasi, disahkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menciptakan diharapkan dapat mendorong perkembangan industri kesehatan nasional agar meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun global. Undang-undang tersebut juga menegaskan komitmen untuk menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global, serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berlakunya Undang-undang No. 17 Tahun 2023 ini membawa implikasi yang dapat memberikan kesempatan sekaligus tantangan kepada korporasi nasional di sektor kesehatan untuk berkembang dalam rangka menjalankan amanat dalam undang-undang tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Membangun ekosistem riset infrastruktur penelitian, kemudahan perizinan riset dan pendukung riset, dan SDM) (Pasal 322, 329).
- Kemudahan hilirisasi riset nasional (Pasal 322, 329).
- Intervensi pelaksanaan paten & lisensi wajib oleh pemerintah (Pasal 314, 326).
- Pengembangan teknologi Biomedik (genomic, transcriptomic, proteomic dll) (Pasal 338).
- Pengutamaan bahan baku (BB) produksi dalam negeri (Pasal 326, 327, 328).
- Mendorong penggunaan, penelitian, pengembangan obat bahan alam (Pasal 141, 321, 324, 325).
- Pemberian kemudahan dalam pelaksanaan riset dan transfer teknologi untuk mendukung ketahanan (Pasal 322, 329).
- Memberikan prioritas insentif bagi industri mendukung kemandirian (Pasal 331).
- Obat generik yang dipasarkan di Indonesia hanya boleh dibuat oleh industri farmasi dalam negeri (Pasal 326).

Dalam rangka hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mencanangkan transformasi sistem kesehatan ini diselenggarakan dengan berlandaskan Undang-Undang No. 17 tahun 2023 dengan fokus substansi untuk perusahaan farmasi. Hal ini tentu akan menjadi titik acuan dan komitmen bersama bagi Bio Farma sebagai BUMN. Transformasi sistem kesehatan tersebut, meliputi:

In the pharmaceutical industry, the passing of Law Number 17 of 2023 on Health creates is expected to encourage the development of the national health industry in order to increase competitiveness at the regional and global levels. The law also emphasizes the commitment to create independence and encourage the development of the national health industry at the regional and global levels, as well as encourage the improvement of safe, quality, and affordable health services for the community, with the hope of improving the quality of life of the community.

The enactment of Law Number 17 of 2023 has implications that can provide opportunities as well as challenges for national corporations in the health sector to develop in order to carry out the mandate in the law, including the following:

- Building a research ecosystem research infrastructure, ease of research licensing and research support, and human resources) (Articles 322, 329).
- Ease of downstreaming of national research (Articles 322, 329).
- Intervention of the enforcement of patents & compulsory licenses by the government (Articles 314, 326).
- Development of Biomedical technology (genomic, transcriptomic, proteomic etc) (Article 338).
- Prioritization of domestically produced raw materials (Articles 326, 327, 328).
- Encourage the use, research, development of natural medicine (Articles 141, 321, 324, 325).
- Providing convenience in the implementation of research and technology transfer to support resilience (Articles 322, 329).
- Prioritize incentives for industries that support self-reliance (Article 331).
- Generic drugs marketed in Indonesia may only be made by the domestic pharmaceutical industry (Article 326).

In this context, the Government of Indonesia through the Ministry of Health launched the transformation of the health system based on Law Number 17 of 2023 with a substantial focus on pharmaceutical companies. This will certainly be a point of reference and joint commitment for Bio Farma as a state-owned enterprise. The health system transformation includes:

- Penguatan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, dengan mengedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia;
 - Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif, memberikan layanan yang berfokus ke pasien berdasarkan siklus kehidupan manusia, dan meningkatkan layanan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta bagi masyarakat rentan;
 - Penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penyelenggaraan rantai pasok dari hulu hingga hilir;
 - Pemanfaatan teknologi kesehatan termasuk teknologi biomedis untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta pelayanan kesehatan menuju pelayanan kedokteran presisi (*precision medicine*);
 - Penguatan sistem informasi kesehatan termasuk kewenangan Pemerintah Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan data kesehatan melalui integrasi berbagai sistem informasi kesehatan ke dalam sistem informasi kesehatan nasional.
- Strengthening the implementation of Health Efforts in the form of promotive, preventive, curative, rehabilitative, and/or palliative, by prioritizing community rights and the responsibility of the Government of Indonesia;
 - Strengthening primary health care by prioritizing promotive and preventive approaches, providing patient-focused services based on the human life cycle, and improving services in remote, underdeveloped, border, and island areas and for vulnerable communities;
 - Strengthening the resilience of pharmaceuticals and medical devices through the implementation of supply chains from upstream to downstream;
 - Utilization of health technology including biomedical technology for the benefit of science and health technology and health services towards precision medicine;
 - Strengthening the health information system includes the authority of the Government of Indonesia to manage and utilize health data through the integration of various health information systems into the national health information system.



Pengawasan terhadap Implementasi Strategi dan Kebijakan Perusahaan serta Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat kepada Direksi

Supervision of the Implementation of Corporate Strategies and Policies as well as the Frequency and Method of Providing Advice to the Board of Directors

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) wajib memiliki 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham; Direksi yang bertugas menjalankan pengurusan Perusahaan; dan Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi.

In accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, a business entity in the form of a Limited Liability Company (PT) must have 3 (three) main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS) as a forum for shareholders; the Board of Directors whose task is to carry out the management of the Company; and the Board of Commissioners whose function is to supervise the management of the Company carried out by the Board of Directors.



Hubungan antara fungsi pengurusan oleh Direksi dan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris harus berjalan secara sinergis. Dalam tatanan organisasi Bio Farma, hubungan sinergis ini terbangun baik secara formal maupun informal. Secara formal, Dewan Komisaris memiliki forum rapat gabungan dengan mengundang Direksi untuk melakukan fungsi pengawasan atas pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi.

Di sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris melaksanakan 13 (tiga belas) kali Rapat Internal dan 12 (dua belas) kali Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi. Dalam rapat-rapat tersebut, dibahas beberapa hal yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris, baik pencapaian target-target yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), laporan kinerja rutin bulanan termasuk kinerja Anggota *Holding* BUMN Farmasi, investasi Bio Farma dan entitas anak, perkembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) terutama pada aspek manajemen risiko dan pengendalian internal, tindak lanjut atas keputusan pemegang saham dan/atau hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maupun hal-hal khusus lainnya.

Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris merupakan bagian dari aspirasi dan amanat pemegang saham. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Dewan Komisaris menjadi representasi atas kepentingan pemegang saham untuk mengawasi pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Kompetensi anggota Dewan Komisaris memungkinkan untuk memberikan masukan kepada Direksi terkait arah dan strategi pengurusan Perusahaan; tentunya dengan batas-batas hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi.

Di samping rapat-rapat sebagaimana telah dijelaskan di atas, fungsi pengawasan juga dilakukan Dewan Komisaris melalui kunjungan untuk mendapatkan perspektif langsung dari lapangan. Di sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris melakukan 4 (empat) kali kunjungan kerja, di mana hasil kunjungan kerja ini menjadi bahan bagi pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

The relationship between the management function by the Board of Directors and the supervisory function by the Board of Commissioners must run synergistically. In Bio Farma's organizational setting, this synergistic relationship is built both formally and informally. Formally, the Board of Commissioners has a joint meeting forum by inviting the Board of Directors to perform its supervisory function over the management of the Company by the Board of Directors.

Throughout 2023, the Board of Commissioners conducted 13 (thirteen) Internal Meetings and 12 (twelve) Joint Meetings by inviting the Board of Directors. In these meetings, the Board of Commissioners discussed a number of matters that require the attention of the Board of Commissioners, including the achievement of targets set out in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), monthly routine performance reports including the performance of State-owned Pharmaceutical Holding Members, investments of Bio Farma and its subsidiaries, developments in Good Corporate Governance (GCG), especially in the aspects of risk management and internal control, follow-up on shareholder decisions and/or the results of the General Meeting of Shareholders (GMS), as well as other special matters.

The supervisory function carried out by the Board of Commissioners is part of the aspirations and mandate of shareholders. Both directly and indirectly, the Board of Commissioners represents the interests of shareholders to oversee the management of the Company by the Board of Directors. The competence of the members of the Board of Commissioners allows them to provide input to the Board of Directors regarding the direction and strategy of the Company's management; of course, within the limits of the rights, authorities and obligations of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

In addition to the meetings as described above, the supervisory function is also carried out by the Board of Commissioners through visits to obtain a direct perspective from the field. Throughout 2023, the Board of Commissioners made 4 (four) working visits, where the results of these working visits became material for supervision of the implementation of the Company's management carried out by the Board of Directors.



Penilaian atas Kinerja Direksi Mengenai Pengelolaan Perusahaan dan Dasar Penilaiannya

Assessment of the Performance of the Board of Directors Regarding the Management of the Company and the Basis for the Assessment

Penilaian kinerja Direksi tahun 2023 dilakukan melalui pemantauan atas *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi tahun 2023 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham dalam kontrak manajemen. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tersebut, penilaian kinerja Direksi mencakup dalam 5 (lima) inisiatif strategis, yaitu Nilai Ekonomi (Keuangan, Operasional, dan Sosial), Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, dan Pengembangan Talenta.

Assessment of the performance of the Board of Directors in 2023 is carried out through monitoring of the Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Directors in 2023 which has been authorized by the Shareholders in the management contract. Based on the established criteria, the performance assessment of the Board of Directors covers 5 (five) strategic initiatives, namely Economic Value (Financial, Operational, and Social), Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Enhancement, and Talent Development.



Dari bobot KPI Kolegial sebesar 100, Direksi dapat mencapai skor sebesar 56,18. Besarnya deviasi ini tak lepas dari kinerja Bio Farma secara konsolidasian yang terdampak dari kinerja entitas anak. Dewan Komisaris telah memberikan berbagai catatan penting atas pencapaian KPI ini yang akan menjadi langkah pijakan bagi Direksi untuk dapat memperbaiki kinerja *Holding* BUMN Farmasi di tahun mendatang.

From the Collegial KPI score of 100, the Board of Directors can achieve a score of 56.18. The amount of deviation is inseparable from Bio Farma's performance on a consolidated basis which is affected by the performance of its subsidiaries. The Board of Commissioners has provided various important notes on the achievement of this KPI which will be a stepping stone for the Board of Directors to be able to improve the performance of the State-owned Pharmaceutical Holding Company in the coming year.



Pandangan atas Prospek Usaha Tahun 2024

Outlook on Business Prospects in 2024

Dalam dokumen WEO yang dirilis IMF pada Januari 2024, perekonomian dunia di tahun 2024 diproyeksikan hanya mampu tumbuh sebesar 3,1% dan belum menunjukkan titik baliknya pasca perlambatan ekonomi di tahun 2023. Bertahannya perekonomian Amerika Serikat dan beberapa negara besar lainnya, serta krisis geopolitik yang belum juga menunjukkan hasil positif, akan menjadi faktor pembentuk dampak negatif atas perekonomian dunia di tahun 2024. Meskipun di sisi lain, pesatnya pasar negara berkembang, kebijakan fiskal Tiongkok yang menunjukkan arah menuju perbaikan, serta inflasi global yang diperkirakan akan melambat menjadi 5,8%, akan membantu perekonomian dunia menemukan keseimbangannya.

Tantangan terbesar Pemerintah Indonesia di tahun 2024 adalah mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap pada level yang tangguh, sebagaimana telah terbukti pada saat pandemi COVID-19 hingga akhir tahun 2023. Tantangan ini semakin lebar, terutama karena adanya transisi pemerintahan yang terjadi di tahun 2023 pasca perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada Februari 2024, dengan target pergantian Presiden Republik Indonesia akan dilakukan pada Oktober 2024. Sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, Perusahaan tentu berperan aktif dalam menjaga proses transisi rezim tersebut.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia tentu memiliki harapan besar akan profil perekonomian yang stabil dan tetap kuat. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 berada pada angka 5,0% hingga 5,2%. Target perekonomian yang stabil ini tak lepas dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang kondusif.

In the WEO document released by the IMF in January 2024, the world economy in 2024 is projected to only be able to grow by 3.1% and has not shown a turning point after the economic slowdown in 2023. The persistence of the economy of the United States and several other major countries, as well as the geopolitical crisis that has not yet shown positive results, will be a factor in shaping the negative impact on the world economy in 2024. On the other hand, the booming emerging markets, China's improving fiscal policy, and global inflation, which is expected to slow down to 5.8%, will help the world economy find its balance.

The biggest challenge for the Government of Indonesia in 2024 is to be able to keep the Indonesian economy at a resilient level, as has been proven during the COVID-19 pandemic until the end of 2023. This challenge is widened, especially due to the transition of government that occurred in 2023 after the General Election (Pemilu) event held in February 2024, with the target of changing the President of the Republic of Indonesia to be held in October 2024. As part of the Indonesian Nation, the Company certainly plays an active role in maintaining the regime transition process.

Facing these conditions, the Government of Indonesia certainly has high hopes for a stable and strong economic profile. In the Draft State Budget (RAPBN) for Fiscal Year 2024, the Government of Indonesia targets national economic growth in 2024 to be at 5.0% to 5.2%. This stable economic target is inseparable from the commitment of the Government of Indonesia to organize conducive simultaneous elections and regional head elections (Pilkada).

Inflasi nasional diharapkan mampu terjaga pada kisaran 2,8% hingga 4%, terutama dengan mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejala eksternal. Rata-rata nilai tukar Rupiah akan bergerak pada kisaran Rp14.850 hingga 15.000 per Dolar Amerika Serikat, sedangkan rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diprediksi berada pada level 6,7%. Untuk harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP) diperkirakan berada pada angka USD80 hingga USD82 per barel.

National inflation is expected to be maintained in the range of 2.8% to 4%, mainly by optimizing the role of the State Budget (APBN) to mitigate inflationary pressures, both due to climate change and external fluctuations. The average Rupiah exchange rate will move in the range of IDR14,850 to 15,000 per US Dollar, while the average 10-year Government Securities interest rate is predicted to be at 6.7%. The Indonesian Crude Price (ICP) is estimated at USD80 to USD82 per barrel.



Pandangan atas Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Views on the Implementation of Good Corporate Governance

Menyandang status sebagai *Holding* BUMN Farmasi, Bio Farma berkepentingan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG pada level terbaik. Prinsip ini menjadi dasar bagi Bio Farma dan seluruh Anggota *Holding* BUMN Farmasi untuk dapat menghadirkan pengelolaan organisasi bisnis yang akuntabel dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris memandang, penerapan prinsip GCG di lingkungan Bio Farma terus mengalami peningkatan secara berkala. Direksi dan seluruh jajarannya terus berupaya untuk membentuk dan mengembangkan implementasi prinsip GCG, terutama terhadap kepatuhan atas peraturan yang berlaku, termasuk kepatuhan atas regulasi yang berlaku dalam industri farmasi. Pembentukan berbagai organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi memberikan bukti bahwa pengelolaan GCG di lingkup Bio Farma berjalan dengan baik. Kerja sama dalam hubungan yang harmonis antara Komite Audit di bawah Dewan Komisaris dan Audit Internal di bawah Direksi menunjukkan adanya keseriusan Bio Farma untuk dapat membentuk proses pengendalian internal yang seimbang dan terukur.

Secara khusus, Dewan Komisaris menyambut baik tindak lanjut dan pemenuhan seluruh keputusan pemegang saham yang tertuang dalam RUPS yang diselenggarakan di sepanjang tahun 2023, baik RUPS yang dilakukan dalam bentuk pertemuan maupun keputusan pemegang saham di luar rapat.

As a State-owned Pharmaceutical Holding, Bio Farma has an interest in implementing GCG principles at the best level. This principle is the basis for Bio Farma and all State-owned Pharmaceutical Holding Members to be able to present the management of a business organization that is accountable and compliant with applicable laws and regulations.

The Board of Commissioners views that the implementation of GCG principles within Bio Farma continues to improve periodically. The Board of Directors and all of its staff continue to strive to shape and develop the implementation of GCG principles, especially towards compliance with applicable regulations, including compliance with regulations applicable in the pharmaceutical industry. The establishment of various supporting organs that assist the Board of Commissioners and the Board of Directors provides evidence that GCG management within Bio Farma is running well. Cooperation in a harmonious relationship between the Audit Committee under the Board of Commissioners and Internal Audit under the Board of Directors shows Bio Farma's seriousness in establishing a balanced and measurable internal control process.

In particular, the Board of Commissioners welcomes the follow-up and fulfillment of all shareholder decisions contained in the GMS held throughout 2023, both GMS conducted in the form of meetings and shareholder decisions outside meetings.



Dewan Komisaris memberikan apresiasi terhadap seluruh keputusan pemegang saham dan terus berupaya melakukan pemantauan atas seluruh keputusan yang telah diambil oleh pemegang saham dalam RUPS. Dewan Komisaris juga memberikan apresiasinya atas penilaian penerapan GCG untuk mendapatkan hasil atau output tata kelola dan evaluasi atas sejauh apa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan di lingkup Perusahaan.

Catatan yang penting untuk perkembangan GCG di lingkup Perusahaan adalah pengendalian internal dan pengelolaan risiko sesuai dengan bisnis inti dan penyesuaian terhadap tren pengelolaan risiko dewasa ini, khususnya risiko yang tercakupkan dalam industri farmasi. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris telah berupaya untuk mengembangkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sebagai salah satu agenda besar terkait perkembangan GCG.

The Board of Commissioners appreciates all shareholder decisions and continues to monitor all decisions made by shareholders in the GMS. The Board of Commissioners also appreciates the assessment of GCG implementation to obtain governance results or outputs and evaluate the extent to which GCG principles have been applied within the Company.

An important note for the development of GCG within the Company is internal control and risk management in accordance with the core business and adjustments to current risk management trends, especially the risks involved in the pharmaceutical industry. The Board of Directors together with the Board of Commissioners has endeavored to develop internal control and risk management systems as one of the major agendas related to GCG development.



Pandangan atas Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) Perusahaan dan Peran Dewan Komisaris dalam WBS Perusahaan

Views on the Management of the Company's Whistleblowing System (WBS) and the Role of the Board of Commissioners in the Company's WBS

Salah satu alat dalam memperkuat penerapan GCG dilakukan melalui keberadaan Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistleblowing System* (WBS). Sistem ini memungkinkan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor.

Bio Farma memiliki kebijakan terkait WBS yang terintegrasi ke dalam Kode Etik Perusahaan, yang telah disahkan Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. KEP-06/DK/BF/04/2021, No. PER-003.01/DIR/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Dalam WBS yang dikembangkan Perusahaan, Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas sekaligus sebagai penerima laporan atas beberapa tingkatan, sebagai berikut:

- Dalam hal pihak telapor adalah Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris, pengaduan yang diterima oleh Tim Admin WBS Bio Farma harus dikirimkan langsung kepada Komisaris Utama.
- Dalam hal pihak telapor adalah Komisaris Utama, laporan harus dikirimkan langsung kepada Pemegang Saham.

One of the tools in strengthening the implementation of GCG is through the existence of a Whistleblowing System (WBS). This system enables a reporting mechanism that guarantees confidentiality and protection for whistleblowers.

Bio Farma has a policy related to WBS that is integrated into the Company's Code of Conduct, which has been approved by the Joint Regulation of the Board of Commissioners and Directors Number KEP-06/DK/BF/04/2021, Number PER-003.01/DIR/IV/2021 dated April 1, 2021 concerning Code of Conduct. In the WBS developed by the Company, the Board of Commissioners acts as a supervisor as well as a recipient of reports at several levels, as follows:

- In the event that the reported party is the Board of Directors, Board of Commissioners or Supporting Organ of the Board of Commissioners, the complaint received by the Bio Farma WBS Admin Team must be sent directly to the President Commissioner.
- In the event that the reported party is the President Commissioner, the report must be sent directly to the Shareholders.

Keterlibatan Dewan Komisaris dalam WBS Bio Farma menegaskan pentingnya struktur organisasi dan penegakan prinsip GCG dalam rangka memperkuat penerapan GCG pada praktik terbaiknya. Di sepanjang tahun 2023, Bio Farma tidak menerima adanya laporan yang masuk melalui WBS yang ada. Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk dapat memperkuat WBS dan mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan, agar fungsi WBS sebagai alat untuk memperkuat penegakan prinsip GCG dapat berjalan dengan baik.

The involvement of the Board of Commissioners in Bio Farma's WBS confirms the importance of the organizational structure and the enforcement of GCG principles in order to strengthen the implementation of GCG in its best practices. Throughout 2023, Bio Farma did not receive any reports through the existing WBS. The Board of Commissioners continues to encourage the Board of Directors to strengthen the WBS and socialize it to all stakeholders, so that the WBS function as a tool to strengthen the enforcement of GCG principles can run well.



Penilaian atas Kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris

Assessment of the Performance of Supporting Organizations of the Board of Commissioners

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organ of the Board of Commissioners



Pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tak lepas dari peran kinerja organ pendukungnya, yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, dan Komite Risiko, Pengembangan & GCG. Penilaian terhadap kinerja organ pendukung tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui dilakukan secara kolegial setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan parameter penilaian berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam rencana kerja tahunan, saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite Dewan Komisaris serta tingkat kehadiran rapat. Penilaian tidak dilakukan dalam bentuk kuantitatif, melainkan penilaian kualitatif berdasarkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan Dewan Komisaris kepada masing-masing organ pendukung.

The implementation of supervisory duties by the Board of Commissioners cannot be separated from the role of the performance of its supporting organs, which consist of the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Nomination & Remuneration Committee, and the Risk, Development & GCG Committee. Assessment of the performance of the supporting organs is carried out by the Board of Commissioners collegially once every 1 (one) year, with assessment parameters based on the realization and completion of work programs that have been arranged in the annual work plan, suggestions, recommendations and input provided by the Board of Commissioners Committee and the level of meeting attendance. The assessment is not carried out in quantitative form, but rather a qualitative assessment based on the implementation of tasks that have been assigned by the Board of Commissioners to each supporting organ.



Dewan Komisaris menilai Komite Audit, Komite Risiko, Pengembangan & GCG, Komite Nominasi & Remunerasi, dan Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan seluruh kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertera dalam piagam masing-masing Komite, dan telah menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan.

The Board of Commissioners assesses that the Audit Committee, Risk, Development & GCG Committee, Nomination & Remuneration Committee, and Secretary of the Board of Commissioners have carried out all their obligations in accordance with the duties and responsibilities as stated in the charter of each Committee, and have completed all assigned tasks.



Informasi tentang Perubahan Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Information on Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Di sepanjang tahun 2023, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris, dengan kronologi yang dapat dilihat di bawah ini:

Throughout 2023, shareholders decided to make changes to the composition of the Board of Commissioners, with the timeline shown below:

Kronologi Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2023
Chronology of Changes in Bio Farma's Board of Commissioners Composition Throughout 2023

Periode 1 Januari s.d 5 Juni 2023 Period of January 1 to June 5, 2023	Periode 5 Juni 2023 s.d 31 Desember 2023 Period June 5, 2023 to December 31, 2023	Keterangan Description
Tanri Abeng (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently Independent Commissioner)	Tanri Abeng (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently Independent Commissioner)	-
Nizar Yamanie (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Nizar Yamanie (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	-
Made Arya Wijaya (Komisaris) (Commissioner)		Made Arya Wijaya tidak lagi menjabat sejak 5 Juni 2023 sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan. Made Arya Wijaya no longer serves as of June 5, 2023, due to the end of his term in office.
Ahmad M. Ramli (Komisaris) (Commissioner)	Ahmad M. Ramli (Komisaris) (Commissioner)	-
Arianti Anaya (Komisaris) (Commissioner)	Arianti Anaya (Komisaris) (Commissioner)	-
Roni Dwi Susanto (Komisaris) (Commissioner)	Roni Dwi Susanto (Komisaris) (Commissioner)	-
	Didik Kusnaini (Komisaris) (Commissioner)	Didik Kusnaini menjabat Komisaris Perusahaan sejak 5 Juni 2023. Didik Kusnaini has been serving as the Company's Commissioner since June 5, 2023.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Thus, the composition of the Board of Commissioners until the end of 2023 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023
The Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan dan Periode Jabatan Term of Office and Period of Office
Tanri Abeng	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-149/MBU/05/2021 tanggal 7 Mei 2021 The Decision of the Minister of SOEs as GMS Number SK-149/MBU/05/2021 dated May 7, 2021	7 Mei 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026, Periode Pertama May 7, 2021, until the GMS which will be held in 2026, First Period
Nizar Yamanie	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-149/MBU/05/2021 tanggal 7 Mei 2021 The Decision of the Minister of SOEs as GMS Number SK-149/MBU/05/2021 dated May 7, 2021	7 Mei 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026, Periode Pertama May 7, 2021, until the GMS which will be held in 2026, First Period
Ahmad M. Ramli	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-258/MBU/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 The Decision of the Minister of SOEs as GMS Number SK-258/MBU/05/2021 dated August 3, 2020	3 Agustus 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025, Periode Pertama August 3, 2020, until the GMS which will be held in 2025, First Period
Roni Dwi Susanto	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-323/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 The Decision of the Minister of SOEs as GMS Number SK-323/MBU/05/2021 dated October 1, 2021	1 Oktober 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026, Periode Pertama October 1, 2021, until the GMS which will be held in 2026, First Period
Arianti Anaya	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-70/MBU/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 The Decision of the Minister of SOEs as GMS Number SK-70/MBU/05/2021 dated March 8, 2022	8 Maret 2022 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027, Periode Pertama March 8, 2022, until the GMS which will be held in 2027, First Period
Didik Kusnaini	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS No. SK-111/MBU/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 The Decision of the Minister of SOEs as GMS Number SK-111/MBU/05/2021 dated June 5, 2023	5 Juni 2023 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028, Periode Pertama June 5, 2023, until the GMS which will be held in 2028, First Period

Pada tanggal 23 Juni 2024, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Bio Farma, Tanri Abeng, tutup usia pada usia 82 tahun. Atas kejadian ini, Dewan Komisaris bersama jajaran dan Direksi serta seluruh Insan Bio Farma menyatakan duka yang mendalam. Hingga ditandatangani laporan tahunan ini per tanggal 22 Juli 2024, pemegang saham belum menetapkan pengganti maupun pelaksana tugas.

On June 23, 2024, Bio Farma's President Commissioner concurrently Independent Commissioner, Tanri Abeng, passed away at the age of 82. For this matter, the Board of Commissioners together with the Board of Directors and all Bio Farma personnel expressed their deep condolences. Until the signing of this annual report as of July 22, 2024, the shareholders have not appointed a replacement or acting commissioner.



Akhir Kata Conclusion

Dewan Komisaris mengajak seluruh Insan Bio Farma dan seluruh anggota *Holding* BUMN Farmasi untuk memanjatkan syukur atas seluruh pencapaian kinerja yang telah ditorehkan. Kepada pemegang saham, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya kepada Direksi atas kerja sama dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam merumuskan berbagai langkah kebijakan Perusahaan. Dewan Komisaris sungguh berharap, pencapaian di tahun 2023 menjadi landasan bagi seluruh pihak untuk dapat terus membangun kebersamaan dan merumuskan langkah yang tepat untuk membawa Bio Farma menuju pertumbuhan yang lebih baik.

The Board of Commissioners invites all Bio Farma personnel and all members of the State-owned Pharmaceutical Holding to express gratitude for all the performance achievements that have been made. To the shareholders, the Board of Commissioners would like to thank them for their trust. The Board of Commissioners would like to express its appreciation to the Board of Directors for the cooperation and commitment shown in formulating the Company's various policy measures. The Board of Commissioners sincerely hopes that the achievements in 2023 will serve as a foundation for all parties to continue building togetherness and formulating the right steps to take Bio Farma towards better growth.

Bandung, 22 Juli 2024
Bandung, July 22, 2024

Atas nama Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero)
On behalf of the Board of Commissioners of PT Bio Farma (Persero)